

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tujuan : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

| Kode | Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|------|--|
| IKT | Tingkat Pengendalian Inflasi dalam ambang batas rentan kendali Nasional 3% \pm 1% |
| | Deskripsi |
| | Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia, sejalan dengan hal tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Tim Pengendalian Inflasi Nasional dalam Keputusan Presiden tersebut termasuk di antaranya Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten. Adapun Sasaran Inflasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/ 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. |
| | Sumber Data |
| | BPS dan BI |
| | Cara Menghitung |
| | Release Capaian Pengendalian Inflasi dari BPS dan BI setiap Bulan dan Tahun |
| | Bagian yang bertanggungjawab |
| | Tim Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | Penanggungjawab Data |
| | Analisis Kebijakan Ahli Madya Perekonomian dan Sumber Daya Alam |

Sasaran : Optimalnya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

| Kode | Indikator Kinerja Utama/Uraian |
|------|--|
| IKS | Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |
| | Deskripsi |
| | Peningkatan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah tidak terlepas dari sumber-sumber pedoman pelaksanaan kegiatan perekonomian atau dengan kata lain kebijakan yang ada. Dalam rangka mendukung peningkatan Perekonomian, Biro Perekonomian memiliki fungsi dan tugas melakukan Fasilitasi Kebijakan-kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan dalam menyusun berbagai komponen postur anggaran pemerintah yang dilansir dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yaitu: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Inflasi 3. Nilai Tukar 4. Suku Bunga SBN 10 Tahun 5. Harga Minyak 6. Lifting Minyak dan Gas |
| | Sebagaimana dalam Rencana Program Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, fokus pelaksanaan fasilitasi kebijakan perekonomian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu fasilitasi kebijakan/rekomendasi kebijakan terhadap penanganan Inflasi di Sulawesi Barat dari sektor-sektor Ketahanan pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan juga fasilitasi kebijakan pembinaan BUMD/BLUD. Sedangkan Pelaksanaan Fasilitasi Kebijakan Administrasi Pembangunan difokuskan pada Kebijakan Pengendalian |

| | |
|--|--|
| | Administrasi Pembangunan Pelaksanaan APBN Provinsi Sulawesi Barat dan juga APBN/APBD Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Sebagaimana dalam Rencana Program Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, fokus pelaksanaan fasilitasi kebijakan perekonomian pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu fasilitasi kebijakan/rekomendasi kebijakan terhadap penanganan Inflasi di Sulawesi Barat dari sektor-sektor Ketahanan pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, minyak dan gas bumi dan juga fasilitasi kebijakan pembinaan BUMD/BLUD. Sedangkan Pelaksanaan Fasilitasi Kebijakan Administrasi Pembangunan difokuskan pada Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan Pelaksanaan APBN Provinsi Sulawesi Barat dan juga APBN/APBD Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. |
| | Sumber Data |
| | Hasil Analisis Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |
| | Cara Menghitung |
| | Jumlah Capaian/Realisasi Hasil Dokumen Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan (R) dibagi dengan Target Dokumen Kebijakan yang ditetapkan (T) x 100 $H = R/T \times 100$ dimana: H = Hasil R = Realisasi Dokumen Hasil Fasilitasi T = Target yang ditetapkan |
| | Bagian yang bertanggungjawab |
| | 1. Tim Perekonomian dan SDA 2. Tim BUMD dan BLUD 3. Tim Administrasi Pembangunan |
| | Penanggungjawab Data |
| | 1. Analis Kebijakan Ahli Madya Perekonomian dan SDA 2. Analis Kebijakan Ahli Madya BUMD dan BLUD 3. Analis Kebijakan Ahli Madya Administrasi Pembangunan |

Mamuju, 23 Februari 2024
Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan



H. Hamdani Hamdi, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina Tk. I / (IV/b)
Nip. 197904092007011015